

PERAN TINGKAT KEMISKINAN DALAM MEMEDIASI PENGARUH UPAH MINIMUM, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN MIMIKA

Muh. Al-Azhar Jamaluddin¹, Arum Santi Presilia Santoso², Winda Astika Ohoirenan³

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Timika Jl. Sultan Hasanuddin, Sempam, Timika, Papua, 99910, Indonesia

E-mail: ¹⁾muhalazharj@gmail.com, ²⁾arumsantisantoso@gmail.com,
³⁾windastika20@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of poverty levels in mediating the effects of minimum wage and economic growth on the Human Development Index (HDI) in Mimika Regency during the 2014–2023 period. Secondary data from the Central Bureau of Statistics were analyzed using a quantitative approach and path analysis method. The results indicate that the minimum wage has a positive and significant effect on HDI but is not significant in reducing poverty levels. Conversely, economic growth positively affects HDI and has a significant negative impact on poverty levels. Additionally, poverty levels do not significantly mediate the relationship between minimum wage or economic growth and HDI. The study concludes that while minimum wage and economic growth improve quality of life, their effects on poverty reduction require a more integrated approach. It is recommended that the government enhance minimum wage policies supported by economic empowerment programs and job creation to improve community welfare more effectively.

Keywords:

minimum wage, economic growth, poverty levels, HDI, Mimika Regency

Abtrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran tingkat kemiskinan dalam memediasi pengaruh upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika periode 2014–2023. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis jalur. Hasil menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, namun tidak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

Kata Kunci:

upah minimum, pertumbuhan ekonomi,

tingkat kemiskinan, IPM,
Kabupaten Mimika

Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap IPM dan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, tingkat kemiskinan tidak memediasi hubungan antara upah minimum maupun pertumbuhan ekonomi terhadap IPM secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun upah minimum dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup, pengaruhnya terhadap pengurangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi. Disarankan agar pemerintah mengembangkan kebijakan peningkatan upah minimum yang didukung program pemberdayaan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan isu global yang menjadi perhatian utama berbagai negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan secara luas untuk mengukur keberhasilan pembangunan, mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Di tingkat global, peningkatan IPM menjadi prioritas untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Di Indonesia, pembangunan manusia juga menjadi agenda penting pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan IPM, namun tantangan seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran masih menjadi hambatan utama, terutama di wilayah timur Indonesia seperti Papua.

Pembangunan manusia adalah sebuah proses dan hasil yang bertujuan untuk memperluas pilihan masyarakat sekaligus menjadi tujuan akhir itu sendiri. Sukirno menyatakan ((Ridho Andykha et al., 2018:114-115) bahwa wilayah dengan populasi besar menghadapi masalah mendasar dalam pembangunan. Tanpa pengendalian pertumbuhan penduduk, tujuan pembangunan ekonomi seperti kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan tidak akan tercapai. Pertumbuhan penduduk bisa menjadi pendorong sekaligus penghambat pembangunan.

Pembangunan manusia berfokus pada peningkatan kemampuan individu untuk memperluas pilihan dan peluang masyarakat. Jika dibandingkan dengan pendekatan sumber daya manusia, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan manusia, indeks ini lebih komprehensif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat di suatu daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas hasil pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Di Kabupaten Mimika, IPM terdiri dari lima komponen utama: Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf, rata-rata lama sekolah, dan riil per kapita. Berikut tabel data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika:



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2023

Grafik 1. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika

Berdasarkan grafik 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2014, IPM tercatat sebesar 70,40. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 70,89 pada tahun 2015 dan 71,64 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, IPM Kabupaten Mimika naik lagi menjadi 72,42, dan kemudian mencapai 73,15 pada tahun 2018. Pertumbuhan positif ini berlanjut pada tahun 2019 dengan IPM sebesar 74,13. Pada tahun 2020, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan, IPM tetap meningkat menjadi 74,19. Peningkatan berlanjut pada tahun 2021 dengan IPM sebesar 74,48, dan mencapai 75,08 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Mimika mencatat angka tertinggi selama periode tersebut, yaitu 75,91.

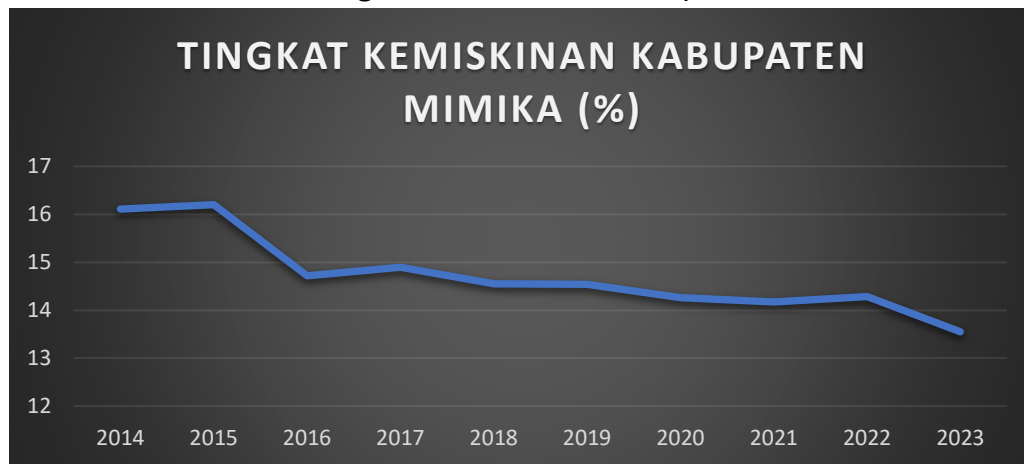
Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan adanya peningkatan terus-menerus dalam kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Mimika selama sepuluh tahun terakhir. Peningkatan IPM ini menunjukkan adanya perbaikan dalam beberapa aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, yang semuanya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.

Pembangunan adalah bagian fundamental dari proses perlindungan sosial, tidak hanya dalam memperbaiki struktur sosial, sikap masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan. Ilmu ekonomi modern berpendapat bahwa dalam mengukur pembangunan, tujuan utama sebuah negara seharusnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memperhatikan kesenjangan dalam aspek ekonomi, sosial, dan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan diartikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan. Dalam ilmu ekonomi, kemiskinan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik yang berhubungan dengan pangan maupun tidak, yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat. (Utomo, 2022:3).

Saat ini, kemiskinan dipahami bukan hanya sebagai stagnasi ekonomi tetapi juga sebagai kegagalan dalam mengatasi permasalahan mendasar dan perbedaan perilaku manusia yang menghalangi individu atau kelompok orang untuk menjalani kehidupan yang bermakna.

Ketika jumlah penduduk sedikit atau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tingkat kemiskinan diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah data tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika:



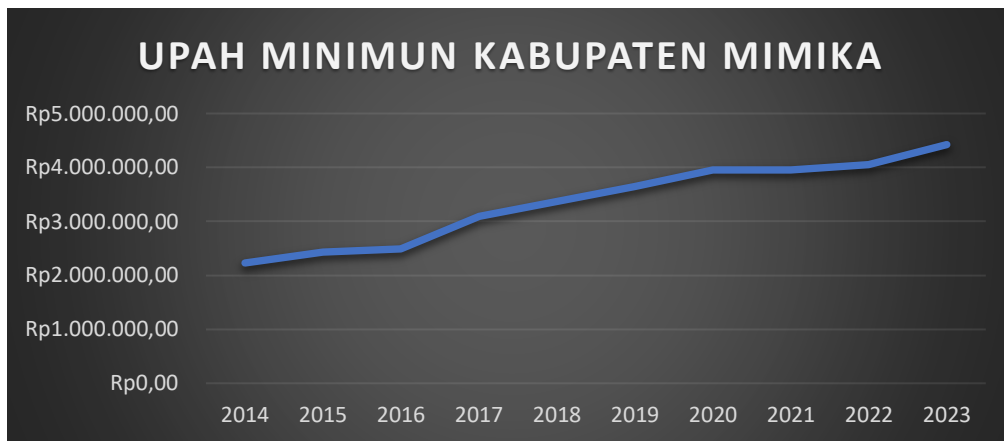
Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2023

Grafik 2. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mimika

Berdasarkan grafik 2. Data tingkat kemiskinan Kabupaten Mimika menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten dari tahun 2014 hingga 2023. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 16,11%, kemudian meningkat sedikit menjadi 16,2% pada tahun 2015. Namun, setelah itu, angka kemiskinan mulai menurun setiap tahunnya. Penurunan ini terus berlanjut dengan fluktuasi kecil, seperti pada tahun 2017 (14,89%) dan 2018 (14,55%). Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan hampir stagnan di 14,54%, tetapi terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2022 dengan angka 14,28%, tingkat kemiskinan kembali menurun pada tahun 2023 hingga mencapai 13,55%. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa ada upaya dan hasil yang positif dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Mimika selama periode 10 tahun tersebut.

Cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berpenghasilan rendah adalah dengan menerapkan kebijakan Upah Minimum. (Islami & Anis, 2019:941).

Upah Minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh dunia usaha atau industri untuk menentukan gaji pekerjanya. Menurut Sumarsono (Pratomo, D.S., & Saputra, 2011:271) upah merupakan sumber pendapatan utama pekerja, sehingga harus memenuhi kebutuhan pekerja dan timnya secara adil. Upah minimum ditentukan oleh indikator Kualitas Hidup (KHL), Produktivitas, dan Pertumbuhan Ekonomi. Di bawah ini adalah data upah minimum di Kabupaten Mimika:



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2023

Grafik 3. Upah Minimum di Kabupaten Mimika

Berdasarkan grafik 3. Data Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Mimika dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014, UMK tercatat sebesar Rp2.230.000,00. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi Rp2.435.000,00. Pada tahun 2016, UMK meningkat sedikit lebih tinggi menjadi Rp2.487.474,00. Tren peningkatan ini terus berlanjut dengan UMK sebesar Rp3.368.421,00 pada tahun 2018 dan Rp3.647.999,00 pada tahun 2019. Pada tahun 2020, UMK meningkat lagi menjadi Rp3.958.444,00 dan tetap pada angka yang sama di tahun 2021. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan UMK sebesar Rp4.052.776,00, dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi Rp4.423.605,00. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya peningkatan yang cukup konsisten dalam upah minimum di Kabupaten Mimika selama sepuluh tahun terakhir. Kenaikan upah ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan upah dengan biaya hidup yang terus meningkat serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja di Kabupaten Mimika.

Kabupaten Mimika, berkat letak strategisnya yang mendukung arus perdagangan internasional, baik dalam hal ekspor maupun impor, memiliki potensi untuk mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Hal ini karena fasilitas perdagangan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Di bawah ini disajikan data pertumbuhan ekonomi di kabupaten Mimika:



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2023

Grafik 4. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika

Berdasarkan grafik 4. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan, mencerminkan dinamika ekonomi yang beragam di wilayah tersebut. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi tercatat negatif sebesar -0,55 persen, menunjukkan kontraksi ekonomi. Namun, pada tahun 2015, ekonomi mengalami perbaikan drastis dengan pertumbuhan sebesar 6,48 persen. Tren positif ini berlanjut dengan pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2016, mencapai 13,51 persen. Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,69 persen, tetapi kembali meningkat tajam pada tahun 2018 dengan angka 10,27 persen.

Tahun 2019 menjadi tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan negatif yang signifikan sebesar -38,52 persen, menandakan penurunan ekonomi yang sangat tajam. Pemulihan terjadi pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 11,44 persen, dan dilanjutkan dengan lonjakan pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 2021 sebesar 36,85 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali ke tingkat yang lebih moderat tetapi tetap positif dengan angka 7,9 persen. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan ketidakstabilan yang cukup tinggi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika selama satu dekade terakhir.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf (2014) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, upah minimum kabupaten/kota, dan laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau. Tingkat kemiskinan cenderung memiliki pengaruh negatif terhadap IPM, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi memperlihatkan pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap peningkatan IPM.

Berdasarkan temuan ini, penulis tertarik untuk meneliti Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika. Penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana variabel tingkat kemiskinan dapat memediasi pengaruh dari upah minimum, dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di wilayah tersebut.

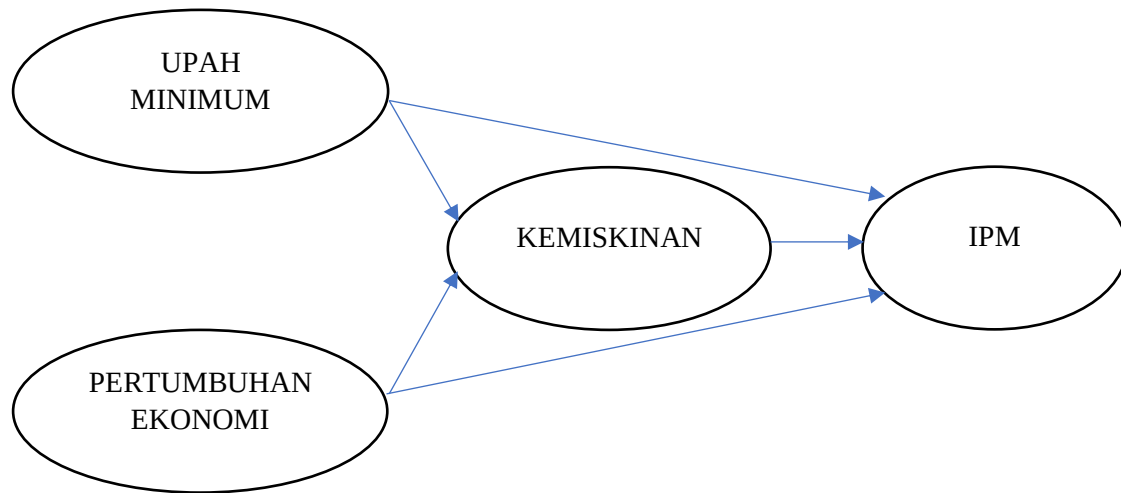
METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Data yang dikumpulkan berasal dari periode 2014 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan variabel dependen meliputi Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis jalur dengan bantuan perangkat lunak EViews 12. Melalui analisis jalur ini, penelitian bertujuan untuk menguji Apakah Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap Tingkat Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.

Model penelitian ini dirancang untuk memahami hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut guna memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut model penelitian yang digunakan adalah:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Model 1 $Y = \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$

Model 2 $Z = \beta_3 X_1 - \beta_4 X_2 - \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots(2)$

Keterangan:

X_1 = Upah Minimum

X_2 = Pertumbuhan Ekonomi

Y = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Z = Tingkat Kemiskinan

β = Koefisien Regresi

e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Parsial (Uji T)

Tabel 1. Hasil Substruktural I

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6488.897	38.51269	168.4873	0.0000
X1	0.000246	1.09E-05	22.58773	0.0000
X2	0.046065	0.019750	2.332394	0.0524
R-squared	0.987653	Mean dependent var	7322.900	
Adjusted R-squared	0.984126	S.D. dependent var	184.3128	
S.E. of regression	23.22210	Akaike info criterion	9.371411	
Sum squared resid	3774.863	Schwarz criterion	9.462187	
Log likelihood	-43.85706	Hannan-Quinn criter.	9.271831	
F-statistic	279.9787	Durbin-Watson stat	2.299012	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data Diolah Dengan Eviews 12

Dari tabel diatas menunjukkan hasil analisis jalur upah minimum dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia, sehingga menghasilkan persamaan berikut:

$$Y = 0,000246 X_1 + 0,046065 X_2 + e_1$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Dengan probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha = 0.05$, variabel Upah Minimum (X_1) memiliki estimasi koefisien sebesar 0.000246, yang menunjukkan adanya hubungan langsung dan signifikan antara upah minimum dan IPM. Artinya, setiap kenaikan 1 persen upah minimum akan meningkatkan IPM sebesar 0.000246 persen, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sebaliknya, jika upah minimum turun sebesar 1 persen, maka IPM juga akan turun sebesar 0.000246 persen pada periode yang sama.

Sementara itu, untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_2), dengan probabilitas $0.0524 > \alpha = 0.05$, hubungan ini tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Namun, nilai estimasi koefisien sebesar 0.046065 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 persen pada pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan IPM sebesar 0.046065 persen, meskipun pengaruh ini tidak signifikan. Sebaliknya, penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen diperkirakan akan menurunkan IPM dengan jumlah yang sama, dengan asumsi faktor lain tetap.

Dengan nilai R-squared sebesar 0.987653 atau 98.77%, hasil regresi menunjukkan bahwa variabel bebas, yaitu Upah Minimum dan Pertumbuhan Ekonomi, mampu menjelaskan 98.77% variasi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sisanya sebesar 1.23% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Selain itu, dengan probabilitas uji F sebesar 0.000000, model ini signifikan secara keseluruhan dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nilai Durbin-Watson sebesar 2.299012 mengindikasikan tidak adanya masalah autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 2. Hasil Substruktural II

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	15.53666	23.89185	0.650291	0.5396
X1	-1.27E-06	9.11E-07	-1.389370	0.2141
X2	-0.000858	0.000256	-3.343965	0.0155
Y	0.000488	0.003682	0.132515	0.8989
R-squared	0.951187	Mean dependent var		14.72700
Adjusted R-squared	0.926781	S.D. dependent var		0.835917
S.E. of regression	0.226191	Akaike info criterion		0.154303
Sum squared resid	0.306975	Schwarz criterion		0.275337
Log likelihood	3.228485	Hannan-Quinn criter.		0.021529
F-statistic	38.97278	Durbin-Watson stat		1.576137
Prob(F-statistic)	0.000250			

Sumber : Data Diolah Dengan Eviews 12

$$Z = -1.27E-06 X_1 - 0.000858 X_2 + 0.030662 Y + e_2$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Dengan probabilitas $0.2141 > \alpha = 0.05$, variabel Upah Minimum (X_1) memiliki koefisien estimasi sebesar $-1.27E-06$, yang menunjukkan hubungan negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap Tingkat Kemiskinan (Z). Hal ini berarti bahwa kenaikan upah minimum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun, secara teoritis, setiap kenaikan 1 unit pada upah minimum (X_1) akan menurunkan tingkat kemiskinan (Z) sebesar $1.27E-06$ unit, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Sebaliknya, penurunan upah minimum sebesar 1 unit dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dengan jumlah yang sama.

Dengan probabilitas $0.0155 < \alpha = 0.05$, variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_2) memiliki koefisien estimasi sebesar -0.000858 , yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (Z). Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan negatif dan signifikan dengan tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan 1 unit pada pertumbuhan ekonomi (X_2) akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.000858 unit. Sebaliknya, penurunan 1 unit pada pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan tingkat kemiskinan dengan jumlah yang sama, dengan asumsi semua variabel lain tetap.

Sementara itu, dengan probabilitas $0.0008 < \alpha = 0.05$, variabel Indeks Pembangunan Manusia (Y) memiliki koefisien estimasi sebesar 0.030662 , yang menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan Tingkat Kemiskinan (Z). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada indeks pembangunan manusia (Y) akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 0.030662 unit, dengan asumsi variabel lain tetap. Sebaliknya, penurunan indeks pembangunan manusia (Y) sebesar 1 unit akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.030662 unit pada tahun yang sama.

Dengan nilai R-squared sebesar 0.951187 , menunjukkan bahwa 95.12% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel bebas, yaitu Upah Minimum (X_1),

Pertumbuhan Ekonomi (X_2), dan Indeks Pembangunan Manusia (Y). Sisanya sebesar 4.88% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Selain itu, nilai probabilitas uji F sebesar $0.000250 < \alpha = 0.05$ mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel dependen. Nilai Durbin-Watson sebesar 1.576137 mengindikasikan kemungkinan adanya autokorelasi ringan dalam model ini.

Interpretasi ini menunjukkan bahwa meskipun Pertumbuhan Ekonomi (X_2) dan Indeks Pembangunan Manusia (Y) memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, variabel Upah Minimum (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.

Secara Simultan (Uji F)

Pada model pertama dengan variabel dependen Y , nilai F-statistic sebesar 279.977 dengan nilai probabilitas (Prob F-statistic) 0.000000. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen (X_1 dan X_2) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y . Karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi standar (misalnya, 0.05), maka hipotesis nol (yang menyatakan bahwa semua koefisien regresi sama dengan nol) ditolak. Dengan kata lain, model regresi ini secara keseluruhan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen (X_1 dan X_2) dengan variabel dependen (Y).

Pada model kedua dengan variabel dependen Z , nilai F-statistic sebesar 38.97278 dengan nilai probabilitas (Prob F-statistic) 0.000250. Sama seperti pada model pertama, hasil ini juga menunjukkan signifikansi yang tinggi. Variabel independen (X_1 , X_2 , dan Y) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Z . Nilai probabilitas yang jauh lebih kecil dari 0.05 mengindikasikan bahwa model ini relevan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen.

Secara keseluruhan, kedua model memiliki hasil uji F yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa variabel independen pada masing-masing model secara bersama-sama relevan dalam menjelaskan variabilitas variabel dependen, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Pada substruktur I (Tabel 1), nilai R-squared sebesar 0,987653 menunjukkan bahwa upah minimum (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (X_2) mampu menjelaskan 98,77% variasi pada tingkat indeks pembangunan manusia (IPM, Y), sedangkan sisanya sebesar 1,23% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Sementara itu, nilai Adjusted R-squared yang sebesar 0.984126 mengoreksi bias akibat penambahan variabel independen, dan nilainya tetap sangat tinggi, yang menegaskan bahwa model ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik.

Pada substruktur II (Tabel 2), nilai R-squared sebesar 0,951187 menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (Y), upah minimum (X_1), dan pertumbuhan ekonomi (X_2)

secara bersama-sama mampu menjelaskan 95,12% variasi pada tingkat kemiskinan (Z), sedangkan 4,88% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Namun, nilai Adjusted R-squared sebesar 0.926191 menunjukkan adanya sedikit penurunan setelah mengoreksi bias akibat penambahan variabel independen, meskipun tetap tinggi. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar variabel independen yang digunakan memang relevan.

Hasil Pengujian Analisis Jalur

Pengaruh Secara Langsung

Berdasarkan hasil analisis dan persamaan di atas, dapat dijelaskan pengaruh langsung sebagai berikut:

1. Pengaruh Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel X_1 (Upah Minimum) berpengaruh signifikan terhadap Y (Indeks Pembangunan Manusia) (Probabilitas = 0.0000, t-statistik = 22.58773). Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Upah Minimum sebesar 1 satuan akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.000426 poin. Ini bisa diartikan bahwa kebijakan peningkatan upah minimum mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Hal ini konsisten dengan temuan (Imelda et al., 2021) yaitu Upah minimum secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sidoarjo tahun 1998-2017. Hasil oleh (Pratama & Ariza, 2024) juga menunjukkan hal serupa dimana Upah minimum berpengaruh signifikan terhadap IPM dengan arah positif. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan kualitas hidup yang akhirnya meningkatkan nilai IPM. Peningkatan upah minimum akan meningkatkan daya beli sehingga berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel X_2 (Pertumbuhan Ekonomi) hampir signifikan terhadap Y (Indeks Pembangunan Manusia) (Probabilitas = 0.0524). Pertumbuhan Ekonomi cenderung memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Walaupun tidak signifikan secara statistik pada tingkat 5%, arah hubungan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia, seperti infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar.

Hasil penelitian didukung oleh (Primandari, 2020) hasil analisis yang sudah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2004-2018, Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini membuktikan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka produktivitas penduduk dalam memperoleh pendapatan akan meningkat. Sehingga akan

meningkatkan proses pembangunan ekonomi dan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil akan menciptakan peningkatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

3. Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel X_1 (Upah Minimum) tidak signifikan secara langsung terhadap Z (Tingkat Kemiskinan) (Probabilitas = 0.2141). Upah Minimum memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Koefisien kecil ini menunjukkan bahwa peningkatan Upah Minimum belum memberikan pengaruh langsung yang signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara statistik.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh (Mangasi Panjaitan, 2020) dimana Upah minimum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta tahun 2011-2020. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hanifah & Hanifa, 2021) yang menunjukkan bahwa upah minimum mempengaruhi negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Upah minimum yang akan meningkat setiap tahun dapat menawarkan gaji yang diberikan melalui suatu instansi kepada personelnnya sehingga karyawan memiliki gaji/penghasilan minimum yang telah ditetapkan dengan menggunakan kewenangan setiap tahun. Hal ini untuk melindungi bagi pekerja supaya tidak terjebak dalam kemiskinan.

4. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel X_2 (Pertumbuhan Ekonomi) signifikan terhadap Z (Tingkat Kemiskinan) (Probabilitas = 0.0155, t -statistik = -3.343965). Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Ini berarti bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 satuan akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0.000858 poin. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga mengurangi kemiskinan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh (Suripto & Subayil, 2020), dimana variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi D.I.Yogyakarta, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi D.I.Yogyakarta.

5. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Y (Indeks Pembangunan Manusia) tidak signifikan terhadap Z (Tingkat Kemiskinan) (Probabilitas = 0.8989). Indeks Pembangunan Manusia tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam pembangunan manusia saja, tanpa ditunjang faktor lain seperti lapangan kerja atau kebijakan ekonomi langsung, tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan.

Penelitian ini searah dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (A. K. Prasetyoningrum & U. S. Sukmawatizz, 2022), yang juga menunjukkan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan memiliki hasil tidak signifikan.

Pengaruh Secara Tidak Langsung

Berdasarkan hasil analisis dan persamaan di atas, dapat dijelaskan pengaruh tidak langsung sebagai berikut:

1. Pengaruh Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Tingkat Kemiskinan

Upah Minimum (X_1) secara signifikan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Y). Namun, hubungan tidak langsung ini tidak cukup kuat memengaruhi Tingkat Kemiskinan (Z), karena Y tidak signifikan terhadap Z . Karena koefisien Y terhadap Z memiliki probabilitas ($p = 0.8989$). Hubungan tidak langsung melalui jalur ini lemah, karena meskipun X_1 meningkatkan Y , efeknya tidak signifikan terhadap Z . Ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum yang meningkatkan kualitas pembangunan manusia belum cukup menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung.

Hasil penelitian didukung oleh (Wiryawan et al., 2024) pengaruh variabel Upah Minimum lebih kuat apabila langsung menuju variabel IPM jika dibandingkan dengan pengaruh variabel Upah Minimum menuju variabel IPM melalui variabel kemiskinan. Ini disebabkan karena jika upah minimum naik dapat meningkatkan minat para calon pekerja untuk mencari pekerjaan di suatu perusahaan sehingga akan membuat tingkat kesejahteraan di provinsi-provinsi di Indonesia akan meningkat juga. Namun tingkat upah yang tinggi belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang ada dikarenakan ketika upah minimum ditingkatkan maka perusahaan memiliki beban biaya yang besar sehingga perusahaan perlu melakukan PHK yang menyebabkan angka pengangguran serta kemiskinan dapat meningkat.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi (X_2) memiliki hubungan langsung signifikan terhadap Z , tetapi hubungan melalui Y kurang kuat, karena Y tidak signifikan terhadap Z . Hubungan tidak langsung melalui jalur ini juga lemah, karena meskipun X_2 cenderung meningkatkan Y , efeknya terhadap Z melalui Y tidak signifikan. Namun, X_2 langsung memengaruhi Z secara signifikan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Nainggolan et al., 2021) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan IPM,

hubungan antara IPM dan tingkat kemiskinan tidak selalu signifikan. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi sering kali tidak merata dan cenderung lebih dinikmati oleh kelompok menengah-atas, sementara kelompok masyarakat miskin tidak merasakan dampak yang sama akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, atau peluang kerja yang layak.

SIMPULAN

Penelitian ini menganalisis hubungan antara upah minimum, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika selama periode 2014–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap IPM, di mana kenaikan upah minimum meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, namun tidak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara langsung. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap IPM dan pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat mengurangi kemiskinan. Tingkat kemiskinan tidak memediasi pengaruh upah minimum maupun pertumbuhan ekonomi terhadap IPM secara signifikan.

SARAN

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan efektivitas kebijakan upah minimum untuk berdampak lebih besar pada pengurangan kemiskinan, misalnya melalui program pendukung seperti pelatihan keterampilan atau subsidi langsung. Selain itu, kebijakan ekonomi yang memacu pertumbuhan sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat miskin perlu diprioritaskan. Sinergi antara peningkatan kualitas pembangunan manusia dan penciptaan lapangan kerja juga menjadi langkah penting untuk mengurangi kemiskinan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, H. H., & Haryanto, I. (2022). Akibat Hukum Bagi Perusahaan Bila Tidak Mengikuti Pengaturan Upah Minimum Bagi Pekerja Di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 723
- UTOMO, B. W. (2022). ... Manusia, Dana Bagi Hasil, Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Kemiskinan Tingkat Kota Di ...
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42783%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/42783/19313246.pdf?sequence=1>
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7721>
- Pratomo, D.S., & Saputra, P. M. A. (2011). KEBIJAKAN UPAH MINIMUM UNTUK PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN: TINJAUAN UUD 1945. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 5(2), 172–182.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2011.005.02.3>
- Statistik, B. P. (2021). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika. *Website Badan Pusat Statistik*.
<https://indramayukab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3>
- Wau, M., Wati, L., & Fau, J. F. (2022). Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual Dan Empirik). *Eureka Media Aksara*, 1–73.
- A. K. Prasetyoningrum & U. S. Sukmawatizz. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6, 35.
<https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i01.p04>
- Hanifah, S., & Hanifa, N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan. *Independent: Journal of Economics*, 1(3), 191–206.
<https://doi.org/10.26740/independent.v1i3.43632>
- Imelda, R., Balafif, M., & Wahyuni, S. T. (2021). Pengaruh Pendidikan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo Tahun 1998-2017. *Bharanomics*, 1(2), 67–74.
<https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.155>
- Mangasi Panjaitan. (2020). Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2011-2020. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan*, 3(1), 104–108.
<http://trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/jpmikp/article/view/1357#>
- Nainggolan, L. E., Sembiring, L. D., & Nainggolan, N. T. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Yang Berdampak

- Pada Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 6427–6438.
https://www.academia.edu/48501667/ANALISIS_PENGARUH_PERTUMBUHAN_EKONOMI_TERHADAP_INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERDAMPAK PADA KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA
- Pratama, A., & Ariza, A. (2024). *Dampak Belanja Modal , Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sekadau*. 3(5), 1338–1350.
- Primandari, N. R. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2004 – 2018. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 25.
<https://doi.org/10.32663/pareto.v2i2.1020>
- Suripto, S., & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Periode 2010-2017. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 127–143. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/35>
- Wiryawan, K. J., Ayu, I., & Pratiwi, M. (2024). *Pengaruh PDRB dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Kemiskinan dan IPM di Provinsi-Provinsi Indonesia*. 20(September).